



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **PRASETYO HADI**
2. Jabatan : **MENTERI SEKRETARIS NEGARA**
3. NHK : **762792**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.284.785.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m²/1004.85 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 3.300.000.000
2. Tanah Seluas 4118 m² di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 679.470.000
3. Tanah Seluas 7911 m² di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 1.305.315.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **2.659.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.5 G / JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD S 2.4 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
3. MOTOR, HONDA GL 200 / SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
4. MOTOR, HONDA N (110A) C AT / SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ 2. 4 / JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000
6. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	306.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.355.290.158
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	11.605.075.158
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.605.075.158

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.